

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Gulf Cooperation Council (GCC) adalah organisasi regional di Timur Tengah yang bertindak sebagai instrumen dan arena untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Qatar dan Arab Saudi. GCC berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, melibatkan Kuwait dan Oman sebagai mediator sangatlah penting. Untuk menyatukan Qatar dan Arab Saudi, GCC berhasil mengadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan damai. Terkait proses penyelesaian konflik, GCC mendorong Kuwait dan Oman sebagai mediator tripartit untuk menjaga hubungan baik dan menjalin komunikasi. Upaya tersebut berhasil dengan dibukanya perjanjian perdamaian dan kerja sama antara kedua negara.

GCC berfungsi sebagai organisasi regional untuk kerja sama antar pemerintah, dan memiliki peran penting sebagai alat diplomasi darurat antara Qatar, Arab Saudi, dan negara-negara anggota lainnya. Sebagai badan antar pemerintah di kawasan Teluk, GCC memainkan peranan yang signifikan dalam memfasilitasi kerja sama yang terkoordinasi dan terfokus antara negara-negara anggota untuk mencapai tujuan dan kemakmuran bersama di kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan Teluk saling bergantung pada GCC dan melalui kerja sama ini, dapat menciptakan integrasi regional. Di tengah krisis diplomasi, GCC menjadi mekanisme yang sangat penting bagi negara-negara anggotanya. Keberadaan GCC mencegah eskalasi konflik domestik yang lebih lanjut antara

Qatar dan Arab Saudi. Meskipun terjadi ketegangan antara keduanya, hubungan dalam kerangka GCC telah mencakup berbagai bentuk kerja sama, seperti kerja sama dalam pelaksanaan ibadah haji, integrasi ekonomi dan kerja sama regional, kerja sama dalam menanggapi serangan terhadap pabrik minyak dan kapal tanker di kawasan Teluk, serta upaya bersama dalam memerangi ekstremisme. Namun, GCC memiliki peran terbatas dalam proses penyelesaian sengketa. Anggota GCC cenderung mencari bantuan dan bergantung pada otoritas yudisial di negara masing-masing atau pihak eksternal untuk menyelesaikan sengketa. Contohnya adalah krisis diplomasi antara Qatar dan Arab Saudi.

Dalam konteks diplomasi Qatar, Kuwait akan berperan sebagai mediator. Ini serupa dengan krisis diplomatik yang dialami Qatar pada tahun 2014, ketika Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menarik duta besar mereka dari Qatar dengan alasan yang serupa dengan krisis tahun 2017. Kuwait percaya bahwa krisis tersebut perlu diselesaikan dengan cepat karena kedua negara tersebut adalah anggota GCC, yang memiliki implikasi terhadap stabilitas regional. Pada tahun 2018, setahun setelah dimulainya krisis diplomatik Qatar, Mohammed bin Salman mengeluarkan pernyataan yang memuji ekonomi Qatar, dan menambahkan bahwa Raja Salman akan mengundang Emir Qatar untuk menghadiri pertemuan Dewan GCC tahun 2018. Undangan tersebut bisa menjadi awal dari pembentukan hubungan diplomatik yang lebih lanjut antara kedua negara. Pernyataan dan undangan tersebut mencerminkan minat Arab Saudi terhadap potensi ekonomi Qatar, serta visi

mereka terkait program Visi 2030 yang bertujuan menjadikan Arab Saudi sebagai pusat regional dan internasional.

Pada Mei 2019, Raja Salman kembali secara resmi mengundang Qatar ke pertemuan darurat GCC di Mekkah untuk membahas aliansi keamanan kawasan Teluk setelah dugaan serangan oleh Iran dan Houthi. Kerja sama dalam serikat keamanan regional dapat memperkuat hubungan yang sebelumnya retak. Keinginan Arab Saudi untuk kepentingan nasional tersebut dapat muncul karena kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara. Pada tahun 2014, kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam memerangi terorisme, sehingga kemungkinan normalisasi dapat muncul jika kedua negara memiliki kepentingan yang sama. Ini juga terjadi pada pertemuan darurat pada Mei 2019 yang berfokus pada keamanan kawasan.

Usaha mediasi Kuwait menjadi sorotan pada KTT GCC ke-41 yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2021. Mediasi Kuwait dilakukan dengan cara damai melalui dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik. Tujuan utama mediasi ini adalah untuk mencapai "persatuan dan stabilitas". Solidaritas antara negara-negara anggota GCC dianggap sangat penting dalam meningkatkan keamanan, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Untuk mencapai hal ini, sengketa blokade antara Arab Saudi dan sekutunya dengan Qatar harus diakhiri. KTT tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Qatar, di mana negara-negara blokade lainnya seperti Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Yaman juga setuju untuk mencabut blokade mereka terhadap Qatar.

Sebagai langkah awal menuju normalisasi, perbatasan darat utama antara Arab Saudi dan Qatar akan dibuka kembali pada tanggal 9 Januari 2021. Selain itu, penerbangan antara Arab Saudi dan Qatar, serta Qatar dan Arab Saudi, akan dilanjutkan kembali pada tanggal 11 Januari 2021.

Dengan langkah ini, berbagai boikot dan embargo yang telah merenggangkan hubungan kedua negara sejak 2017 sudah menjadi masa lalu. Embargo perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir secara resmi berakhir pada tahun 2021. Sejak itu, negara-negara secara bertahap semakin dekat, termasuk selama Piala Dunia FIFA 2022 ketika Qatar menjamu para pemimpin dari tiga negara yang memboikot sebagai kehormatan. negara-negara yang diundang sbagai tamu. Yang paling menonjol adalah pertukaran duta besar, di mana layanan konsuler antar negara juga akan dilanjutkan.

Pencapaian Qatar dan Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi merupakan solusi konflik terbaik berdasarkan kepentingan dan kepercayaan pada keseimbangan kekuatan. Kesepakatan dicapai secara interaktif, sehingga para pihak merasa terikat dengannya; ini menjawab kebutuhan dan perhatian dasar kedua belah pihak agar mandiri, dan membangun kepercayaan kerja di antara para pihak sehingga tidak terlalu bergantung pada pengawasan terus-menerus. Bahkan jika dalam konflik ini rekonsiliasi tidak ditafsirkan sebagai solusi yang paling tepat untuk konflik dan sesuai dengan arti sebenarnya, Qatar dan Arab Saudi sekali lagi menjalin kemitraan pragmatis di mana masing-masing pihak menanggapi kebutuhan dan keterbatasan pihak lain

dan melibatkan diri. untuk timbal balik. Keberhasilan kesepakatan tersebut menimbulkan dukungan publik terhadap kesepakatan tersebut dan mendorong berkembangnya citra baru.

Keberhasilan Qatar juga dapat dilihat dari beberapa indikator yang signifikan yang tidak dapat diabaikan oleh banyak pihak. Qatar berhasil memenuhi kebutuhan bahan baku dengan menjalin kemitraan dengan negara-negara seperti Turki, India, Oman, Kuwait, Iran, Pakistan, dan Amerika Serikat untuk mencari pemasok baru. Meskipun menghadapi tantangan dalam hubungan diplomatik, pemerintah Qatar telah berhasil merevitalisasi kebijakan untuk mengatasi krisis. Situasi di Qatar tidak memburuk sejak insiden tahun 2017, dan negara ini berhasil bangkit dan memberikan jawaban yang kuat bagi dunia. Berbagai barang impor tetap bisa diangkut melalui Pelabuhan Internasional Hamad, dengan Angkatan Udara Qatar membentuk brigade udara untuk melindungi pengiriman barang, termasuk produk susu dan unggas, ke pasar lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan Qatar bergantung pada kerja sama dengan negara-negara seperti Turki, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Iran. Embargo yang diberlakukan oleh empat negara Arab telah memperkuat dan menyatukan bangsa Qatar. Qatar telah membangun kapasitas manufaktur domestik yang baru untuk menggantikan impor dari negara-negara yang melakukan embargo tersebut. Negara ini telah menemukan rute perdagangan baru setelah rute-rute sebelumnya ditutup akibat pemutusan hubungan diplomatik. Qatar menjalin kemitraan dekat dengan Turki dan Iran

untuk menjaga ketersediaan pangan dan keamanan negara dari ancaman serangan militer dari Arab Saudi. Qatar juga telah mendirikan perusahaan pelayaran baru dengan mitra dagang Oman. Dalam upaya untuk memfasilitasi perdagangan, Qatar memanfaatkan fasilitas kelas dunia seperti Pelabuhan Hamad dan Bandara Internasional Hamad. Peran pemerintah Qatar dalam pemulihan politik juga telah membantu pemulihan ekonomi negara ini, dengan dukungan kepada petani lokal dan pengembangan produk baru. Larangan impor yang diberlakukan menunjukkan kepercayaan diri Qatar baik secara politik maupun ekonomi. Selain itu, Qatar telah menghapus persyaratan visa untuk 80 negara dan memperbolehkan investor asing memiliki 100% saham dalam pengembangan Zona Ekonomi Bebas. Upaya perubahan juga dilakukan untuk mendorong investasi asing. Dengan kebijakan bebas visa ini, Qatar juga memperluas sektor pariwisata. Pemerintah Qatar juga telah mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang melalui Qatar Foundation, yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan masyarakat Qatar dan menggali potensi individu.

Selain itu, bantuan dari Oman, Iran, Turki, dan Kuwait juga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Qatar, termasuk makanan dan bahan bangunan, serta mencapai perdamaian. Negara-negara ini merupakan mitra dagang yang dapat dipercaya bagi Qatar, yang ingin membangun hubungan jangka panjang dan tidak ingin terlibat dalam blokade. Pada akhirnya, upaya pemblokiran gagal dalam usahanya untuk mengisolasi Qatar.

5.2 Saran

Agar dikemudian hari konflik antara Arab Saudi dan Qatar tidak terulang lagi maka usaha Gulf Cooperation Council harus berkerja sama dengan negara-negara Teluk untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Saran untuk mengatasi ketegangan dan mencapai perdamaian anatar kedua negara tersebut:

1. **Menghormati Kedaulatan dan Non-Interferensi:** Kedua belah pihak harus bersedia untuk menghormati kedaulatan masing-masing dan tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Prinsip non-interferensi akan membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling percaya.
2. **Mencari Titik Kesamaan dan Kepentingan Bersama:** Identifikasi titik-titik kesamaan dan kepentingan bersama antara Arab Saudi dan Qatar, seperti isu-isu regional yang memerlukan kolaborasi, perdagangan, atau kerja sama keamanan
3. **Membuka Jalur Komunikasi:** Memfasilitasi pembukaan jalur komunikasi formal dan informal antara pejabat pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dari kedua negara untuk mempererat pemahaman dan saling percaya.